

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Perjanjian Pada Umumnya

a. Pengertian Perjanjian

Terlebih dahulu perlu diketahui perbedaan pengertian antara perikatan dengan perjanjian. Sebagaimana diketahui bahwa dalam buku ke tiga Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai hukum perikatan. Dalam kitab ini, tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan perikatan itu sendiri. Istilah perikatan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu “*Verbintesis*”. Istilah perikatan ini dipakai untuk suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memnuhi tuntutan itu.¹⁶

Dengan istilah perikatan ini, maka dapat dilihat adanya suatu hubungan yang saling timbal balik antara orang atau pihak satu dengan orang atau pihak yang lainnya, dimana dengan adanya perikatan tersebut masing – masing pihak, satu dengan lainnya mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dengan sukarela, maka pihak yang lain dapat menuntutnya di pengadilan. Karena hal yang mengikat itu selalu ada maka oleh pembentuk Undang – Undang

¹⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT. Intermasa, 1985, hlm. 1

diakui dan diberi akibat hukum. dengan demikian, hubungan antara dua orang atau dua pihak tadi dinamakan hubungan hukum.

Hal yang mengikat adalah suatu peristiwa hukum yang dapat berupa perbuatan, kejadian, dan keadaan. Peristiwa hukum tersebut menciptakan hubungan hukum. Perikatan lahir karena suatu perjanjian atau karena Undang – Undang.¹⁷ Hubungan hukum yang timbul diantara pihak – pihak yang terlibat dalam perikatan tersebut melahirkan hak dan kewajiban yang kemudian menimbulkan “*prestasi*”, yaitu sesuatu yang dituntut oleh salah satu kepada pihak yang satu. Tiap – tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.¹⁸

Perjanjian atau *Verbinten* mengandung pengertian yaitu suatu hubungan Hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.¹⁹ Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dapat dikatakan peristiwa dimana dua orang atau lebih saling mengikrarkan diri untuk berbuat sesuatu.

Definisi perjanjian batasannya telah diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan bahwa, “Suatu perjanjian adalah suatu

¹⁷ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, 1999, Hlm. 313.

¹⁸ Solahuddin, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Visimedia, 2008, hlm. 8

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Segi – Segi Hukum Perdata*, Bandung, Penerbit Alumni, 1986, hlm. 6.

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Definisi perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut sebenarnya tidak lengkap karena terdapat beberapa kelemahan yang perlu dikoreksi. Kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai berikut.²⁰

- a. Hanya menyangkut sepihak saja.
- b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus
- c. Pengertian perjanjian terlalu luas.
- d. Tanpa menyebut tujuan

Berdasarkan alasan – alasan diatas maka perjanjian dapat dirumuskan sebagai berikut : *“Perjanjian adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan”*.

Dalam perjanjian terdapat pihak – pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian. Pihak yang berhak menuntut sesuatu prestasi tersebut dinamakan kreditur atau si berpiutang dan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berhutang. Dalam mewujudkan prestasi yang dijanjikan ini, masing – masing pihak dituntut peran aktifnya. Tanpa peran aktif ini, prestasi yang diperjanjikan akan sukar diwujudkan.

Dengan diakuinya perjanjian yang berlaku sebagai Undang-Undang tersebut, maka apabila salah satu pihak cedera janji atau

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 198.

ingkar janji terhadap kewajiban berprestasi seperti yang telah dijanjikan, pihak yang lain dapat menuntut agar prestasi tersebut dilaksanakan. Hal ini dapat dilakukan dengan menuntut pihak yang ingkar janji melalui pengadilan.

b. Syarat Sahnya Perjanjian

Setiap ketentuan hukum, juga harus ada yang bersifat mengatur sehingga dapat diletakkan pedoman dan dasar suatu tindakan hukum. Seperti halnya dalam suatu perjanjian, maka ketentuan hukum tersebut harus diperhatikan dalam hal antara lain syarat – syarat sahnya suatu perjanjian. Perjanjian sah artinya telah memenuhi syarat – syarat yang telah ditentukan oleh Undang – Undang, sehingga ia diakui oleh hukum. Untuk sahnya suatu perjanjian, menurut pasal 1320 KUH Perdata, diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Dua syarat yang pertama yaitu poin (a) dan poin (b) dinamakan syarat subjektif, dikarenakan mengenai pihak – pihak dalam suatu perjanjian atau subjek yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat terakhir yaitu poin (c) dan poin (d) dinamakan syarat objektif, dikarenakan mengenai perjanjian itu sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan.

Syarat yang pertama yaitu sepakat, dimaksudkan bahwa kedua pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seiya-sekata mengenai hal – hal pokok dari perjanjian.²¹ Syarat yang kedua yaitu cakap, dimaksudkan bahwa orang yang membuat suatu perjanjian haruslah cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum.²²

Syarat yang ketiga yaitu harus mengenai suatu hal tertentu, artinya adalah apa yang diperjanjikan hak – hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Bahwa barang itu sudah ada atau sudah berada di tangan pihak yang berutang pada waktu perjanjian dibuat dan tidak diharuskan oleh Undang – Undang.²³ Syarat keempat yaitu adanya sebab yang halal, sebab dalam hal ini dimaksudkan bahwa tidak ada lain dari pada isi perjanjian, sebab itu adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang termaksud.²⁴

c. Unsur – Unsur Perjanjian

Dalam perjanjian itu sendiri, bila kita mendetailkan perjanjian maka dapat ditemukan unsur – unsur perjanjian itu sendiri antara lain sebagai berikut.

²¹ R. Soebekti. Op.Cit. Hlm. 17

²² Ibid.

²³ Ibid., hlm. 19

²⁴ Ibid

1. *Essentialia*, unsur ini mutlak harus ada agar perjanjian itu sah, merupakan syarat sahnya perjanjian. Unsur *essentialia* dalam perjanjian mewakili ketentuan – ketentuan berupa prestasi – prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut. Ada suatu perbedaan, yang membedakan secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Unsur ini pada umumnya dipergunakan dalam memberikan rumusan, definisi, atau pengertian dari suatu perjanjian.
2. *Naturalia*, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam – diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian. Unsur *naturalia* pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu yaitu berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat – cacat tersembunyi. Sehubungan dengan hal itu, maka berlakulah ketentuan Pasal 1339 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “*Perjanjian – perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal – hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, melainkan juga untuk segala suatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang – undang*”.²⁵

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 2009, hlm. 118 – 119.

3. *Accidentalalia*, yaitu unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan – ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak sesuai dengan kehendak pihak, merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama – sama oleh para pihak. Dengan demikian, maka unsur ini pada hakekatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak.²⁶

d. Subjek dan Objek Perjanjian

Subjek perjanjian adalah pihak – pihak yang terkait dengan suatu perjanjian. KUH Perdata membedakan tiga golongan yang tersangkut pada, yaitu para pihak yang mengadakan perjanjian, ahli waris mereka dan pihak ketiga.²⁷ Subjek perjanjian terdiri dari orang, badan hukum dan dalam perjanjian kontrak kerja konstruksi para pihak dibagi menjadi kreditur dan debitur. Badan hukum dapat berbentuk firma, (Fa), Persatuan Komanditer (CV), Perseroan Terbatas (PT), dan Badan Usaha Koperasi. Badan hukum sebagai subjek hukum dapat bertindak sebagai manusia. Dalam pembuatan perjanjian, jika badan hukum bertindak sebagai subjek hukum, maka harus diwakili oleh orang atau manusia.

Sementara, objek perjanjian adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum, dan yang menjadi objek perjanjian adalah

²⁶ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjajian*, Jakarta, Rajawali, 2010, hlm. 7-8.

²⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung, Alumni Bandung, 1994, hlm. 22

prestasi. Prestasi merupakan hal yang harus dilakukan oleh masing – masing pihak. Prestasi adalah kewajiban salah satu pihak dan pihak lain berhak menuntut hal itu. Dalam perjanjian, debitur wajib melakukan perbuatan tertentu yang telah ditetapkan dalam perjanjian dan dalam melakukan perbuatan itu debitur harus memenuhi semua ketentuan dalam perjanjian, Debitur bertanggungjawab atas perbuatannya yang tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian.

e. Asas – Asas Perjanjian

Setiap aturan ataupun ketentuan hukum mempunyai sistem tersendiri yang berlaku sebagai asas dalam hukum tersebut. Demikian pula halnya dalam hukum perjanjian, yang memiliki asas – asas sebagai berikut.

1. Asas Personalitas

Pada prinsipnya asas personalitas menentukan bahwa suatu perjanjian berlaku bagi pihak yang membuatnya saja. Ketentuan mengenai asas ini tercantum dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata berbunyi “*Pada umumnya seseorang yang tidak mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri*”. Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk dirinya sendiri. Pasal 1340 KUH Perdata berbunyi “*(1) Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak – pihak yang*

membuatnya. (2) perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”.

2. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak atau sering disebut juga sistem terbuka adalah bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, walaupun belum atau tidak diatur dalam undang – undang. Meskipun berlaku asas ini, kebebasan berkontrak tersebut dibatasi oleh tiga hal, yaitu tidak dilarang oleh undang – undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.²⁸ Setiap perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai Undang – Undang bagi para pembuatnya. Rumusan ini dapat ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang dipertegas kembali dengan ketentuan ayat (2) yang menyatakan bahwa perjanjian yang telah disepakati tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan – alasan yang ditemukan oleh undang – undang.²⁹

3. Asas Konsensualitas

Kata konsensualisme berasal dari kata latin consensus yang berarti sepakat. Arti asas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Asas konsensualitas mengandung

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Op.Cit., hlm. 87

²⁹ Solahudin, *Op.Cit.*, hlm. 469

arti bahwa perjanjian ini terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat (*konsensus*) antara pihak – pihak mengenai pokok perjanjian. Sejak saat itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum. Suatu kesepakatan lisan diantara para pihak telah mengikat para pihak yang telah bersepakat secara lisan tersebut, dan oleh karena ketentuan ini mengenai kesepakatan lisan diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka rumusan tersebut dianggap sebagai dasar asas konsensualitas dalam hukum perjanjian. Suatu perjanjian timbul apabila ada konsensus atau persesuaian kehendak antara para pihak. Dengan kata lain, sebelum tercapainya kata sepakat, perjanjian tidak mengikat. Konsensus tersebut tidak perlu ditaati apabila salah satu pihak menggunakan *paksaan*, *penipuan*, ataupun terdapat *kekeliruan* akan objek perjanjian.³⁰

4. Asas Kekuatan Mengikat

Setiap orang yang membuat perjanjian, dia terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut karena perjanjian tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata yang menentukan bahwa semua perjanjian dibuat secara sah

³⁰ Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 5

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.³¹

5. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang itikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) bahwa perjanjian harus dilakukan itikad baik. Sementara itu, Arrest H.R di Negeri Belanda memberikan peranan tertinggi terhadap itikad baik dalam tahap praperjanjian bahkan kesesatan ditempatkan dibawah asas itikad baik, bukan lagi pada teori kehendak.³²

B. Tinjauan Umum Kesepakatan Perdamaian

a. Pengertian Kesepakatan Perdamaian

Kesepakatan perdamaian adalah dokumen yang memuat syarat-syarat yang disepakati oleh para pihak guna mengakhiri sengketa yang merupakan hasil dari upaya perdamaian dengan bantuan seorang mediator atau lebih. Persetujuan perdamaian yang dibuat para pihak dan terdapat dalam persetujuan itu bahwa para pihak tidak meminta pengukuhan dari pengadilan.

Kata perdamaian artinya penghentian permusuhan, tidak bermusuhan, keadaan tidak bermusuhan, berbaik kembali, tenteram aman. Berdamai artinya berbaik kembali, berunding untuk

³¹ Ahmad Miru, *Hukum Perjanjian dan Perancangan Perjanjian*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 5

³² Ibid

menyelesaikan perselisihan. Mendamaikan atau memperdamaikan artinya menyelesaikan permusuhan, merundingkan supaya mendapat persetujuan.³³ Kata damai dipadankan dalam bahasa Inggris *peace tranquility*. Berdamai dipadankan dengan kata *be peaceful, be on good terms*. Kata memperdamaikan, mendamaikan dipadankan dengan kata *resolve, peacefully*.³⁴ Dalam bahasa Belanda, kata *dading* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi perdamaian, musyawarah atau persesuaian, persetujuan kedua belah pihak atas dasar saling pengertian mengakhiri suatu perkara.³⁵

Perdamaian merupakan suatu persetujuan di mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu sengketa yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara, dan persetujuan perdamaian tidak sah melainkan harus dibuat secara tertulis. Dalam persengketaan selalu terdapat dua atau lebih pihak yang sedang bertikai dalam penyelesaian persengketaan, dapat saja para pihak menyelesaikannya sendiri tanpa melalui pengadilan. Untuk menghindari timbulnya kembali persoalan yang sama dikemudian hari, maka dalam praktek sering perjanjian damai itu dilaksanakan tertulis, yaitu dibuat akta perjanjian perdamaian.

³³ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Diolah Kembali Oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, Balai Pustaka, 2005, hlm. 259

³⁴ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia-Inggris*, Jakarta, PT Gramedia, 1994, hlm. 129.

³⁵ Fockema Andrea, *Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia*, Jakarta, Bina Cipta, 1983, hlm. 87, hlm. 616

b. Akta Perdamaian

Dalam proses penyelesaian sengketa, akta perdamaian merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh dan memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat. Akta perdamaian dibuat karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan.

Pasal 1 angka 10 PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan bahwa : “*Akta perdamaian adalah akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan Hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian*”. Akta perdamaian lahir dari perjanjian perdamaian yang dilakukan melalui mediasi dan dikuatkan menjadi sebuah akta melalui putusan Pengadilan. Perjanjian tersebut secara formal harus berbentuk tertulis agar dapat dikatakan secara sah dan bersifat mengikat.

Secara umum Akta Perdamaian dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu akta perdamaian dengan persetujuan Hakim (*akta vanvergelijk*) dan akta perdamaian tanpa persetujuan Hakim (*acte van dading*).

- a. Akta Perdamaian dengan persetujuan Hakim atau *akta vanvergelijk*

Secara umum, suatu putusan baru memiliki kekuatan hukum tetap, apabila terhadapnya sudah tertutup upaya hukum.

Biasanya agar suatu putusan memiliki kekuatan yang demikian, bilamana telah ditempuh upaya banding dan kasasi. Namun terhadap putusan akta perdamaian, undang-undang sendiri yang melekatkan kekuatan itu secara langsung kepadanya. Segera setelah putusan diucapkan, langsung *inhern* pada dirinya berkekuatan hukum tetap, sehingga perdamaian itu mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.³⁶ Akta Perdamaian yang didasarkan atas Putusan Hakim Pengadilan sudah memiliki kekuatan eksekutorial. Apabila salah satu pihak tidak mentaati atau tidak melaksanakan isi yang tertuang dalam akta perdamaian secara sukarela, maka dapat dimintakan eksekusi kepada Pengadilan Negeri. Dan Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan eksekusi.

b. Akta Perdamaian dengan persetujuan Hakim atau *akta van dading*

Dading adalah suatu perjanjian (*overeinkomst*) yang tunduk pada Buku III KUH Perdata. Oleh sebab itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, maka *dading* yang merupakan suatu perjanjian yang apabila dibuat secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, maka bersifat mengikat seperti halnya undang-undang bagi para pihak yang

³⁶ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.* hlm. 279-280

membuatnya. *Dading* hanya dapat dibatalkan atau ditarik kembali apabila para pihak yang terikat oleh *dading* menyepakati pembatalan atau penarikan kembali kesepakatan tersebut, selain itu pembatalan juga dapat dilakukan atas dasar suatu alasan yang sah menurut undang-undang dinyatakan cukup untuk pembatalan atau penarikan kembali.

Akta perdamaian merupakan salah satu produk hukum yang dibuat oleh Notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dalam kedudukannya sebagai pejabat umum, yang berpegang teguh dalam menjalankan profesinya yaitu sebagai seorang penengah yang tidak memihak, pelayanan diberikan kepada semua pihak, dan berusaha menyelesaikan semua persoalan, sehingga semua pihak merasa puas dan memperoleh kepastian hukum karena produk akta perdamaian yang dikeluarkan oleh notaris merupakan sebuah akta otentik dan menjadi alat bukti yang mengikat dan sempurna.

C. Tinjauan Umum Upaya Hukum Penyelesaian Perkara

a. Pengertian Upaya Hukum

Upaya hukum untuk menyelesaikan sengketa, secara garis besar terdapat dua model penyelesaian sengketa keperdataan, yaitu secara litigasi dan non-litigasi. Kedua macam model penyelesaian sengketa ini sebagai antisipasi ketika sengketa tidak dapat diselesaikan dengan satu model penyelesaian saja. Upaya hukum merupakan hak bagi

setiap orang untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi.

Upaya hukum litigasi adalah persiapan dan presentasi dari setiap kasus, termasuk juga memberikan informasi secara menyeluruh sebagaimana proses dan kerjasama untuk mengidentifikasi permasalahan dan menghindari permasalahan yang tak terduga. Sedangkan Jalur Litigasi adalah penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan.³⁷ Sementara, jalur non-litigasi berarti menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Jalur non-litigasi berarti menyelesaikan masalah hukum diluar pengadilan. Jalur non-litigasi ini dikenal dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian Sengketa diluar pengadilan diakui di dalam peraturan perundangan di Indonesia.

Salah satu upaya Hukum selain litigasi dalam lingkup Hukum Perdata adalah gugatan. Gugatan adalah suatu tindakan sipil yang dibawa di pengadilan hukum dimana penggugat, pihak yang mengklaim telah mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan tergugat, menuntut upaya hukum untuk mendapat keadilan. Tergugta diperlukan untuk menanggapi keluhan Penggugat. Jika penggugat berhasil, penilaian akan diberikan dalam mendukung penggugat, dan berbagai perintah pengadilan mungkin dikeluarkan untuk menegakkan

³⁷ Redaksi Berita Transparansi, Perbedaan Litigasi Dan Non Litigasi, <https://www.beritatransparansi.com/perbedaan-litigasi-dan-non-litigasi/>, diunduh pada Kamis 20 Februari 2020.

hak, kerusakan penghargaan, atau memberlakukan perintah sementara atau permanen untuk mencegah atau memaksa tindakan.

Upaya hukum ialah suatu upaya yang diberikan oleh Undang – Undang bagi seseorang maupun badan hukum dalam hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai suatu tempat bagi pihak – pihak yang tidak puas atas adanya hakim yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan, tidaklah sesuai dengan apa yang diinginkan, karena hakim itu juga seorang manusia yang bisa secara tidak sengaja melakukan kesalahan yang dapat menimbulkan salah mengambil keputusan atau memihak kepada salah satu pihak.

b. Upaya Hukum Biasa

Upaya hukum biasa merupakan upaya hukum yang digunakan untuk putusan yang belum berkekuatan tetap. Upaya ini mencakup sebagai berikut.

1) Upaya Hukum Perlawanan (*Verzet*)

Verzet, atau Perlawanan adalah upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan pengadilan karena tergugat tidak hadir pada waktu perkara tersebut diperiksa atau perkara yang diputus secara verstek. Kepada pihak yang dikalahkan serta diterangkan kepadanya bahwa ia berhak mengajukan perlawanan (*verzet*) terhadap putusan tak hadir itu kepada pengadilan.

Dalam hal perlawanan telah diajukan dan ternyata pada hari sidang yang telah ditentukan terlawan atau kuasanya tidak

datang menghadap di persidangan, terlawan yang semula penggugat, dapat dipanggil sekali lagi sesuai dengan ketentuan Pasal 126 HIR. Dan apabila terlawan/ dahulu penggugat tidak juga datang menghadap pada hari sidang berikutnya, terlawan/ dahulu penggugat dianggap tidak hendak melawan atas perlawanan yang telah diajukan terhadap putusan verstek tersebut, karena itu perlawanan ini akan diputus secara contradiktoir dengan membatalkan putusan verstek yang semula serta mengadili lagi dengan menolak gugatan semula.

Terhadap putusan ini bahwa terlawan/ dahulu penggugat, dalam tenggang waktu yang ditentukan dapat mengajukan permohonan banding, yang berhak mengajukan perlawanan atau Verzet adalah hanya hanya terbatas tergugat saja, sedangkan kepada penggugat tidak diberi hak untuk mengajukan perlawanan kembali, sesuai Pasal 129 ayat (1) dan Pasal 83 Rv. Ketentuan ini sesuai dengan penegasan putusan Mahkamah Agung Nomor. 524 K/ Sip/ 1975 yang menyatakan, verzet terhadap verstek hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak dalam perkara.

2) Upaya Hukum Banding

Upaya Hukum Banding ialah upaya hukum yang dilakukan terhadap putusan Pengadilan Negeri karena merasa tidak puas terhadap putusan yang dijatuhkan tersebut. Dengan diajukannya permohonan banding oleh salah satu pihak yang

berperkara, maka putusan Pengadilan Negeri tersebut masih belum mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga belum dapat dilaksanakan. Kecuali putusan pengadilan negeri itu merupakan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu.³⁸

Berdasar pada UU No. 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Pokok Kekuasaan dan juga pada UU No. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan. Permohonan banding tersebut harus diajukan dan ditujukan kepada panitera Pengadilan Negeri yang telah menjatuhkan putusan (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 1947).

Urutan banding berdasarkan pada Pasal 21 UU No. 4 Tahun 2004 jo. Pasal 9 UU No. 20 Tahun 1947 yang mana mencabut ketentuan dari Pasal 188-194 HIR, ialah:

1. Adanya pernyataan ingin banding
2. Panitera membuat suatu akta banding
3. Telah dicatat dalam register induk perkara
4. Pernyataan banding harus telah di terima oleh pihak terbanding paling lama empat belas(14) hari sesudah suatu pernyataan banding tersebut dibuat.
5. Pihak pembanding juga dapat membuat suatu memori banding, terbanding juga bisa mengajukan suatu kontra memori banding.

³⁸ Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 17

3) Upaya Hukum Kasasi

Kasasi adalah upaya hukum yang dilakukan terhadap putusan Pengadilan Tinggi, karena pihak-pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan yang diberikan padanya. Permohonan kasasi tersebut dapat diajukan kepada Mahkamah Agung. Diajukannya permohonan kasasi, maka putusan Pengadilan Tinggi pada tingkat banding tersebut belum dapat dilaksanakan karena masih belum memperoleh kekuatan hukum tetap.

Permohonan kasasi dapat diajukan oleh pihak yang berperkara sendiri atau orang lain yang mendapat kuasa khusus untuk itu, yang kemudian diajukan secara tertulis maupun secara lisan melalui panitera Pengadilan Negeri yang telah memutuskan perkaranya pada tingkat pertama, dengan tenggang waktu 14 hari sesudah putusan yang dimaksud diberitahukan kepada pemohon. Apabila di dalam tenggang waktu 14 hari telah lewat tanpa ada permohonan kasasi dari pihak yang berperkara, maka pihak yang berperkara tersebut dianggap telah menerima putusan yang bersangkutan.

Permohonan kasasi dicatat oleh panitera Pengadilan Negeri dalam buku daftar setelah pemohon kasasi membayar biaya berperkara. Dalam tenggang waktu 7 hari setelah permohonan kasasi didaftarkan, panitera Pengadilan Negeri harus memberitahukan secara tertulis mengenai permohonan kasasi itu

kepada pihak lawan. Adapun alasan yang dipergunakan dalam permohonan kasasi yang ditentukan di dalam Pasal 30 UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 yaitu:

1. Tidak berwenang (baik itu merupakan kewenangan absolut maupun kewenangan relatif) untuk melampaui batas suatu wewenang;
2. Salah menerapkan ataupun melanggar hukum yang berlaku;
3. Lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang telah diwajibkan oleh peraturan perUndang-Undangan yang dapat mengancam kelalaian dengan batalnya suatu putusan yang bersangkutan atau berkaitan.

4) Gugatan

Menurut Sudikno Mertokusumo gugatan adalah tuntutan hak yaitu tindakan yang bertujuan memberikan perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*).³⁹ Sementara itu, menurut Darwin Prinst yang dikutip oleh Lilik Mulyadi menyebutkan bahwa gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya, dan harus diperiksa menurut tata

³⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 2002, hlm. 52.

cara tertentu oleh pengadilan, serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut.⁴⁰

Gugatan dalam hukum perdata dibagi menjadi dua yaitu.

1. Gugatan Permohonan atau Gugatan Voluntair

Dasar hukum Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dalam UU No. 35 Tahun 1999 menyatakan: Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan peradilan mengandung pengertian didalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yurisdiksi voluntair

2. Gugatan Contentiosa

Dasar hukum Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dalam UU No. 35 Tahun 1999 dan sekarang diatu dalam Pasal 16 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2004 sebagai pengganti UU No. 14 Tahun 1970, Pasal 118 (1) HIR, Pasal 119 HIR, Pasal 120 HIR, Pasal 1 RV. Gugatan Contentiosa adalah Gugatan yang mengandung sengketa diantara dua pihak atau lebih.

c. Upaya Hukum Luar Biasa

⁴⁰ Mulyadi, *Tuntutan Provisionil Dalam Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Djambatan, 1996, hlm. 15.

Upaya Hukum Luar Biasa adalah suatu upaya hukum dilakukan atas putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan juga dalam asasnya upaya hukum ini tidaklah menangguhkan eksekusi, yang di dalamnya mencakup antara lain:

- 1) Perlawanan Pihak Ketiga (*derden verzet*) terhadap sita eksekutorial

Perlawanan pihak ketiga ini terjadi bilamana dalam putusan pengadilan yang telah merugikan kepentingan dari pada pihak ketiga, oleh karenanya pihak ketiga itu bisa mengajukan perlawanan atas suatu putusan tersebut. Berdasarkan di dalam Pasal 378-384 Rv dan Pasal 195 (6) HIR.

Upaya hukum luar biasa pada dasarnya suatu putusan tersebut hanya mengikat para pihak yang berperkara saja (antara pihak penggugat dan pihak tergugat tersebut) dan tidak mengikat kepada pihak ketiga (akan tetapi di dalam hal ini hasil putusan tersebut juga akan mengikat orang lain atau pihak ketiga, oleh karenanya dapat dikatakan luar biasa). Denderverzet tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri yang telah memutus suatu perkara pada tingkat pertama pengadilan.

- 2) Peninjauan Kembali (*Request civil*)

Peninjauan Kembali adalah apabila terdapat hal-hal ataupun keadaan yang ditentukan oleh undang-undang, terhadap suatu putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan

dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung di dalam perkara perdata dan pidana oleh para pihak-pihak yang memiliki kepentingan.

Batas tenggang waktu di dalam pengajuan (seratus delapan puluh) 180 hari setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap (bedasarkan dalam Pasal 69 UU No. 14 Tahun 1985). Mahkamah Agung telah memutus suatu permohonan dalam peninjauan kembali dalam tingkat pertama dan juga terakhir (Bedasarkan dalam Pasal 70 UU No. 14 Tahun 1985).

D. Konsep Umum Putusan Pengadilan

a. Pengertian Putusan Pengadilan

Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya.⁴¹ Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang yang diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.⁴²

Menurut Lilik Mulyadi., Putusan Hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan perkara pidana yang terbuka

⁴¹ Moh. Taufik Makarao, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, Cet 1, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004), hal. 124

⁴² Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 174

untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.⁴³

b. Jenis Putusan Pengadilan

Putusan hakim atau lazim disebut putusan pengadilan diatur dalam pasal 185 HIR, Pasal 196 R.Bg, dan Pasal 46-48 Rv. Hal ini tanpa mengurangi ketentuan lain yang ikut mengatur mengenai putusan hakim atau putusan pengadilan tersebut, maka dapat dikemukakan berbagai segi putusan hakim yang diklasifikasikan dalam beberapa jenis putusan.

a. Putusan Sela

Putusan sela atau putusan yang bersifat sementara yang bukan merupakan putusan akhir, sebagaimana yang terdapat pada pasal 185 ayat (1) H.I.R atau pasal 48 RV. Tujuan dijatuhkannya putusan sela untuk mempermudah perkara yang akan dihadapi. Didalam persidangan putusan sela diucapkan secara terpisah sebelum dijatuhkannya putusan akhir, namun putusan sela tidak dibuat dengan putusan tersendiri, melainkan hanya ditulis dalam berita acara persidangan. Sehingga jika pihak yang berperkara menginginkan putusan sela maka hakim

⁴³ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis Dan Prakter Pradilan*, Mandar Maju, 2007, hal 127.

hanya dapat memberikan salinan otentik dari berita acara tersebut dengan membayar biayanya.⁴⁴

Dalam teori dan praktiknya, putusan sela dapat dikualifikasikan dalam beberapa macam putusan, antara lain sebagai berikut.

1. Putusan *Preparator*, adalah putusan sebagai akhir yang tanpa ada pengaruh terhadap pokok perkara atau putusan akhir. Misalnya: putusan yang untuk menggabungkan dua perkara atau untuk menolak diundurkannya pemeriksaan saksi, putusan yang memerintahkan pihak yang diwakili oleh kuasanya untuk datang sendiri.⁴⁵
2. Putusan *Interlocutoir*, putusan sela yang dapat mempengaruhi akan bunyi putusan akhir. Misalnya: pemeriksaan saksi, putusan untuk mendengar para ahli, pemeriksaan setempat, putusan tentang pembebanan pihak, sumpah dan putusan yang memerintahkan salah satu pihak untuk membuktikan sesuatu.
3. Putusan *Incidentel*, adalah putusan yang berhubungan dengan insiden, yaitu suatu peristiwa atau kejadian yang menghentikan prosedur peradilan biasa. Misalnya kematian kuasa dari satu pihak, baik tergugat maupun penggugat,

⁴⁴ Abdul Kadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, cet V, Bandung: P.T Citra Aditya Bakti, 1992. Hal.165

⁴⁵ Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, 231.

putusan yang membolehkan seseorang ikut serta dalam perkara voeging, vrijwaring, tusschenkoms.⁴⁶

4. Putusan *Provisioneel*, adalah putusan yang menjawab tuntutan provisional, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatukan. Jadi putusan yang disebabkan oleh adanya hubungan dengan pokok perkara dapat menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak yang berperkara. Misalnya: putusan mengenai gugatan istri terhadap suaminya untuk memberi biaya penghidupan selama pokok perkara masih berlangsung dan belum menghasilkan putusan akhir.⁴⁷

b. Putusan Akhir

Menurut H.Ridwan Syahrani, putusan akhir (eindvonnis) adalah putusan yang mengakhiri perkara perdata pada tingkat pemeriksaan tertentu. Perkara perdata dapat diperiksa pada 3 (tiga) tingkat pemeriksaan, yaitu pemeriksaan tingkat pertama di pengadilan negeri, pemeriksaan tingkat banding di pengadilan tinggi, dan pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung.⁴⁸

⁴⁶ Ibid., hlm. 232

⁴⁷ Ibid., 233

⁴⁸ H. Zainuddin Mappong, *Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan Dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata)*, Malang: Tunggul Mandiri Publishing, 2010.

Putusan akhir ditinjau dari segi sifatnya dapat dibedakan atas tiga macam yaitu sebagai berikut.

1. Putusan *Declaratoir*, adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar yang menyatakan atau menegaskan tentang suatu keadaan atau kedudukan yang sah menurut hukum. Dalam putusan ini dinyatakan hukum tertentu yang dituntut atau dimohon oleh penggugat atau pemohon ada atau tidak ada, tanpa mengakui adanya hak atas suatu prestasi tertentu. Oleh karena itu, putusan *declaratoir* murni tidak mempunyai atau memerlukan upaya pemaksa karena sudah mempunyai akibat hukum tanpa bantuan pihak lawan yang dilakukan untuk melaksanakannya, sehingga hanya mempunyai kekuatan mengikat.⁴⁹
2. Putusan *Constitutief*, adalah putusan yang dapat meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru.
3. Putusan *Condemnatoir*, adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan dalam persidangan untuk memenuhi prestasi. Pada umumnya putusan *condemnatoir* ini terjadi disebabkan oleh karena dalam hubungan perikatan antara penggugat dan tergugat yang bersumber pada perjanjian atau undang-undang telah terjadi

⁴⁹ Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 175

wanprestasi dan perkaranyadiselesaikan di pengadilan. Dalam perkara perdata, bentuk hukumannya berupa kewajiban untuk melaksanakan atau memenuhi prestasi yang dibebankan kepada pihak yang teerhukum. Prestasi yang dimaksud dapat berupa memberi,berbuat, atau tidak berbuat.

c. Kekuatan Hukum Putusan Pengadilan

Dalam pasal 180 HIR dan Pasal 191 R.Bg menyebutkan adanya suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dari sini terdapat pula putusan hakim yang belum mempunyai hukum tetap. Putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang – undang masih terbuka kesempatan untuk menggunakan upaya melawan putusan tersebut. Sedangkan putusan hokum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang – undang tidak ada kesempatan untuk menggunakan upaya hukum biasa, jadi putusan tersebut tidak dapat diganggu gugat. Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara perdata mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan untuk dapat dilaksanakan yaitu sebagai berikut.

1. Kekuatan Mengikat

Putusan hakim dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa perkara dan menetapkan hak atau hukumnya atas dasar permintaan pihak untuk diselesaikan perkaranya di pengadilan,

sehingga pihakpihak harus taat dan tunduk pada putusan, harus dihormati dan dijalankan sebagaimana mestinya. Putusan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat (*bindende kracht*) adalah suatu putusan hakim yang tidak bisa ditarik kembali, walaupun ada *verzet*, *banding* atau *kasasi*, berarti putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga mengikat.

2. Kekuatan Pembuktian

Putusan dalam bentuk teertulis yang merupakan akta autentik yang tidak lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak, yang akan dipeerlukan untuk mengajukan upaya hukum. Meskipun putusan pengadilan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga, namun mempunyai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga.

3. Kekuatan Eksekutorial

Kekuatan eksekutorial adalah putusan di maksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa atau menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan juga realisasi atau pelaksanaannya (eksekusinya) secara paksa. Untuk itu apa yang telah ditentukan majelis hakim dalam putusannya harus dilaksanakan walaupun banyak orang membantahnya. Kekuatan eksekutorial putusan hakim tidak dapat dilumpuhkan, kecuali apabila telah dipenuhi dengan sukarela.